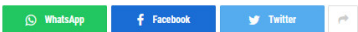


	News Title : Kemendag Kaji Aturan Ekspor CPO Wajib Melalui Bursa Komoditas	
	Media Name : Sawitindonesia.com	Journalist : -
	Publish Date : 02 March 2023	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 0
	Resources : Musdhalifah Machmud (Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian), Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : -	Topic : Aturan Izin Ekspor CPO

Kemendag Kaji Aturan Ekspor CPO Wajib Melalui Bursa Komoditas

BY REDAKSI - 9 HOURS AGO 2 MINS READ



Kemendag sedang menyusun aturan baru yang akan mewajibkan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) melalui bursa berjangka komoditas.

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Didid Noordiatmoko, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemendag mengatakan bahwa strategi membentuk harga rujukan CPO Indonesia merupakan bagian dari membangun kedaulatan industri sawit di dalam negeri. Karena itulah, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sedang menyusun aturan baru yang akan mewajibkan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) melalui bursa berjangka komoditas.

Informasi ini disampaikan dalam Seminar Hybrid Majalah Sawit Indonesia bertemakan "Strategi Indonesia Menjadi Harga CPO Dunia" yang diadakan di Jakarta, Kamis (2 Maret 2023).

Seminar ini dihadiri Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian RI. Adapun empat pembicara yang menjadi narasumber antara lain Didid Noordiatmoko Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kemendag RI, Kabul Wijayanto Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana BPDPKS, Dwi Sutoro Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), dan Rahmanto Amin Jatmiko Direktur PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara yang dimoderatori oleh Dr. Tungkot Sipayung.

Baca juga : [Gubernur Riau Syamsuar Dianugerahi Penghargaan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Dalam Menjalankan Program PSR](#)

Didid mengatakan aturan tersebut masih digodok dan membutuhkan kajian matang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kebijakan domestic market obligation (DMO) dan ekspor. Lalu, akan dikaji pula produk CPO yang wajib diekspor melalui bursa berjangka. Selanjutnya mekanisme bursa untuk memfasilitasi perdagangan.

Peranan Bappebti membentuk referensi harga komoditas di Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang No 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. "Bappebti berhasil membangun price reference timah yang berada di dua bursa yaitu BBJ dan ICDX. Itu sudah menjadi harga acuan bagi dunia," ujarnya.

Baca juga : [Manfaatkan Secara Maksimal SRG Agar Dapat Meningkatkan Produktivitas](#)

Menurut Didid, bahwa tujuan dari harga referensi ini adalah membentuk harga pasar yang transparan dan diyakini semua pihak sehingga dapat menjadi referensi harga.

"Nantinya akan setiap CPO yang diekspor wajib melewati bursa terlebih dahulu. Tetapi bagi produk CPO yang telah diolah menjadi produk turunan tidak perlu lewat bursa komoditas," ujarnya.

Dikatakan Didid bahwa Kementerian Perdagangan sedang mengusulkan supaya ada neraca komoditas untuk diketahui besaran ekspor, produksi, dan konsumsi sawit di Indonesia.

Baca juga : [1.000 UMKM Binaan Pertamina Mengikuti The International Handicraft Trade Fair \(INACRAFT\)](#)

Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian RI, mengatakan usulan Kemendag mengenai referensi harga CPO telah sampai di meja presiden. "Nantinya, Kemendag yang leading dalam pembentukan harga dan bursa komoditas," pungkasnya.